

LEMBAR

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*

Hasil Penelitian Tidak Dipublikasikan

Judul Artikel	:	Pengukuran Kinerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Value for Money
Penulis	:	Wuku Astuti, S.E., M.Ak., Akt. CA.
Identitas	:	-
a). Judul	:	Pengukuran Kinerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Value for Money
b). Bulan/tahun	:	Semester Genap 2023/2024
c). Edisi (bulan/tahun)	:	-
d). Penerbit	:	-
e). Jumlah halaman	:	50 halaman
f). ISSN	:	-
g). Url	:	https://drive.google.com/file/d/1plq3Vh6o40WfYTskJVPem9f-ulhzA49/view?usp=sharing
h). Alamat web	:	-

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Artikel					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Jurnal Internasional	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	Artikel Ilmiah Tidak Dipublikasikan	Koran/ Majalah populer/ umum	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kelengkapan unsur isi buku (10%)				0,2		0,2
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				0,6		0,6
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				0,6		0,5
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)				0,6		0,6
Total = (100%)				2		1,9
Kontribusi Pengusul (Penulis tunggal)						

Komentar Peer Reviewer:

1. Tentang Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur

Selesai

2. Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan

Dibahas dengan mendalam

3. Kecukupan dan Kemutakhiran data serta Metodologi

cupup dan data mutakhir

4. Kelengkapan Unsur Kualitas Penerbit

Terlampun di perpustakaan univ

5. Indikasi Plagiasi

Tidak ada

6. Kesesuaian Bidang Ilmu

Selesai keilmuan

Yogyakarta, 27 Agustus 2024

Penilai



(Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA)

NIDN : 0516047501

Jabatan Akademik : Lektor (300 AK)

Unit Kerja : Politeknik YKPN Yogyakarta

LEMBAR

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*

Hasil Penelitian Tidak Dipublikasikan

Judul Artikel	:	Pengukuran Kinerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Value for Money
Penulis	:	Wuku Astuti, S.E., M.Ak., Akt. CA.
Identitas	:	-
a). Judul	:	Pengukuran Kinerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Value for Money
b). Bulan/tahun	:	Semester Genap 2023/2024
c). Edisi (bulan/tahun)	:	-
d). Penerbit	:	-
e). Jumlah halaman	:	50 halaman
f). ISSN	:	-
g). Url	:	https://drive.google.com/file/d/1plq3Vh6o40WfYTskJVPem9f-ulhzA49/view?usp=sharing
h). Alamat web	:	-

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Artikel					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Jurnal Internasional	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	Artikel Ilmiah Tidak Dipublikasikan	Koran/ Majalah populer/ umum	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kelengkapan unsur isi buku (10%)				0,2		0,2
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				0,6		0,6
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				0,6		0,6
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)				0,6		0,5
Total = (100%)				2		1,9
Kontribusi Pengusul (Penulis tunggal)						

Komentar Peer Reviewer:

1. Tentang Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur

Sesuai

2. Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan

Sesuai

3. Kecukupan dan Kemutakhiran data serta Metodologi

Sesuai metodologi nya .

4. Kelengkapan Unsur Kualitas Penerbit

Belum dipublikasi (dipublikasi di repositori kampus UWM) .

5. Indikasi Plagiasi

tidak ada .

6. Kesesuaian Bidang Ilmu

Sesuai .

Yogyakarta, 27 Agustus 2024

Penilai



(Sucahyo Heriningsih, S.E., M.Si., Ak., CA)

NIDN : 0524047301

Jabatan Akademik : Lektor Kepala (400 AK)

Unit Kerja : FE UPN "Veteran" Yogyakarta

Bidang ilmu : Ilmu Ekonomi
Topik : Akuntansi Sektor Publik

LAPORAN PENELITIAN



PENGUKURAN KINERJA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF VALUE FOR MONEY (STUDI TAHUN 2012-2022)

Peneliti:
Wuku Astuti, SE., M.Ak., Akt., CA. (NIDN.0526048502)

Universitas Widya Mataram

2024

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Pengukuran Kinerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Value For Money (Studi Tahun 2012-2022)
2. Bidang Ilmu : Akuntansi Sektor Publik
3. Ketua Peneliti
Nama Lengkap : Wuku Astuti, SE., M. Ak., Akt., CA.
NIK/NIDN : 510810241/052604852
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
Jabatan Fungsional : Lektor
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram
Status Dosen : Dosen Tetap Yayasan
Nomor HP : 085640061647
Alamat surel : wukuastuti@gmail.com
4. Anggota Mahasiswa
a. Nama/NIM : Nafisah Azhar Asy Syadza/ 201123744
5. Biaya Penelitian :
Sumber dari institusi : Rp 5.000.000
Sumber Lain : Rp 0 _____ +
Rp 5.000.000

Yogyakarta, 27 Mei 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Wuku Astuti, SE., M. Ak., Akt., CA.

NPP. 510810189

Ketua Peneliti

Wuku Astuti, SE., M. Ak., Akt., CA.

NPP. 510810241

Menyetujui
Kepala LPPM UWM



Prof. Dr. I. Ambar Rukmini, M.P.

NIP. 196412081992032001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN HASIL PENELITIAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	4
I.3 Tujuan Penelitian.....	5
I.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Teori <i>Stewardship</i>	6
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	7
2.3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	17
2.4 Pengukuran Kinerja.....	19
2.5 Pengukuran Anggaran Berbasis Kinerja	21
2.6 Pengukuran Kinerja Berbasis <i>Value for Money</i>	25
2.7 Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
3.2 Jenis Penelitian	30
3.3 Populasi dan Sampel	30
3.4 Teknik Penarikan Sampel.....	30
3.5 Jenis Data	31
3.6 Data yang Dibutuhkan.....	31
3.7 Metode Pengumpulan Data	31
3.8 Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Rasio Ekonomi	34

4.2	Rasio Efisiensi.....	35
4.3	Rasio Efektivitas	36
4.4	Kinerja Keuangan Provinsi D.I Yogyakarta.....	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		39
5.1	Kesimpulan.....	39
5.2	Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA		41
LAMPIRAN		44
LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN.....		50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kriteria Rasio Ekonomi Kinerja Keuangan	31
Tabel 2 Kriteria Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan	31
Tabel 3 Kriteria Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan	33
Tabel 4 Perhitungan Rasio Ekonomi Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2012-2022	34
Tabel 5 Perhitungan Rasio Efisiensi Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2012-2022.....	35
Tabel 6 Perhitungan Rasio Efektivitas Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2012-2022.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	29
----------------------------------	----

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggali evaluasi kinerja keuangan anggaran Provinsi Yogyakarta melalui analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari tahun 2012 hingga 2022. Evaluasi ini berpusat pada konsep Value for Money (VfM), menekankan pengelolaan dana publik yang efisien, efektif, dan ekonomis. Studi ini menyoroti pentingnya melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penganggaran untuk meningkatkan akuntabilitas, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas strategis. LRA berfungsi sebagai alat penting untuk mengukur kinerja keuangan Provinsi D.I Yogyakarta dengan memberikan wawasan tentang realisasi pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan, memungkinkan penilaian komprehensif manajemen keuangan pemerintah terhadap target anggaran yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomi rata-rata sebesar 93%, dengan pengecualian pada tahun 2013 yang mencapai 102%. Rasio efisiensi menunjukkan angka di bawah 100%, menandakan kinerja keuangan yang baik, kecuali pada tahun 2015 di mana rasio efisiensi mencapai 103%, menunjukkan ketidakefisienan. Pada tahun 2020, rasio efektivitas mencatat angka terendah sebesar 92%, namun rata-rata rasio efektivitas selama periode 2011-2022 adalah 102%, menunjukkan bahwa kinerja keuangan secara umum efektif.

Kata kunci : kinerja keuangan; rasio ekonomi; rasio efisiensi; rasio efektivitas; value for money; Provinsi DIY

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia sudah diberlakukan lebih dari satu dasawarsa. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (jogjapro.go.id). Otonomi daerah diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah, suatu daerah memiliki hak yang lebih besar dalam penyelenggaraan daerahnya sendiri.

Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan tanggung jawab bagi daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka otonomi daerah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti (Thamrin, 2019):

- 1) Meningkatkan transparansi: Transparansi adalah kunci untuk membuat pemerintah daerah lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah jelas, tepat, dan terlengkap.
- 2) Meningkatkan ketertiban: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang diberikan adalah konsisten dan menjamin hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak otonomi daerah.
- 3) Meningkatkan pengelolaan keuangan: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa anggaran yang dianggarkan dan realisasi anggaran adalah efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana yang dianggap diteruskan ke proyek-proyek yang berkaitan dengan tujuan otonomi daerah.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

- 5) Meningkatkan pengembangan sumber daya: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa sumber daya yang ada di daerah dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan otonomi daerah.
- 6) Meningkatkan pengembangan keterampilan: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa para pemerintah daerah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola otonomi daerah secara efektif dan efisien.

Pemerintah daerah juga berwenang untuk menetapkan indikator kinerja sebagai landasan untuk menilai kinerja pemerintahan. Indikator kinerja pemerintah sendiri, bisa diukur dengan pengukuran kinerja kuantitatif/ keuangan dan pengukuran kinerja kualitatif/ pelayanan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah bisa menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Kinerja Keuangan Daerah: Indikator ini menilai pencapaian hasil kerja atau pengelolaan keuangan, termasuk anggaran dan realisasi anggaran, dengan menggunakan parameter keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan atau peraturan selama periode anggaran.
- 2) *Value for Money* (VfM): Indikator ini mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dari sudut pandang nilai dana publik. VfM mencakup pengelolaan dana publik secara efisien, efektif, dan ekonomis.
- 3) *Balanced Scorecard* (BSC): BSC adalah model pengukuran kinerja yang menggabungkan aspek kinerja strategis, internal, dan eksternal. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai keberhasilan, efisiensi, dan efektivitas kinerja mereka.

Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- 2) Menyokong penyaluran sumber daya dan proses pengambilan keputusan.
- 3) Meningkatkan pertanggungjawaban publik serta meningkatkan komunikasi di dalam lembaga.

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan konsep *Value for Money* (VfM), yang merupakan indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah pengelolaan

anggaran/ dana publik efektif, efisien, dan efektif. VfM mengacu pada pengelolaan dana publik dengan cara yang efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengukuran kinerja berbasis anggaran diperlukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan peluang untuk menafsirkan *good governance* dengan kebutuhan-kebutuhan dari ekonomi global tersebut.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan VfM dapat dijalankan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Aspek Ekonomi: Aspek ekonomi dalam VfM menekankan pengelolaan dana publik secara efisien, efektif, dan ekonomis. Penilaian kinerja pemerintah daerah dapat difokuskan pada aspek ekonomi, misalnya melalui pengevaluasian belanja daerah yang lebih rendah dari yang direncanakan.
- 2) Ketercapaian Efisiensi: Efisiensi dalam konteks VfM berarti pengelolaan dana publik yang optimal untuk mencapai output yang diinginkan. Penilaian kinerja pemerintah daerah bisa dilakukan dengan melihat sejauh mana belanja daerah memenuhi spesifikasi output yang diinginkan.
- 3) Keberhasilan Efektivitas: Efektivitas VfM mengacu pada pencapaian tujuan yang diinginkan melalui pengelolaan dana publik. Evaluasi kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana belanja daerah mencapai hasil atau output yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Penelitian terdahulu oleh Polii et.al (2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015-2017 yang dihitung dengan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas menunjukkan hasil yang baik dengan persentase berada di atas 85%. Penelitian Perdana et.al (2020) memberikan hasil bahwa APBD Kota Surabaya selama kurun waktu 2014-2018 menunjukkan bahwa rasio ekonomi, rasio efektifitas dan rasio efisiensi menunjukkan performa yang baik.

Namun berdasarkan penelitian Sella (2018), efektivitas dan efisiensi

realisasi anggaran Kelurahan Kutoanyar Kabupaten Tulungagung periode 2013-2017 dikatakan masih kurang efektif karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan jauh dengan target anggaran belanja. Penelitian Susanto (2019) mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Mataram tahun 2012-2015 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Diharapkan Pemda Kota Mataram dapat lebih meningkatkan PAD, serta melakukan skala prioritas alokasi belanja daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut dan berdasarkan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda, dengan mengukur rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, kita dapat mengetahui apakah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki kinerja keuangan yang baik, serta apakah realisasi anggaran belanja sesuai dengan program atau kegiatan yang direncanakan sampai realisasinya.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diuraikan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pada laporan realisasi anggaran Provinsi Yogyakarta pada Tahun 2012 - 2022?
2. Bagaimana rasio ekonomis pada laporan realisasi anggaran Provinsi Yogyakarta pada tahun 2012 - 2022?
3. Bagaimana rasio efisiensi pada laporan realisasi anggaran Provinsi Yogyakarta pada tahun 2012 - 2022?
4. Bagaimana rasio efektivitas pada laporan realisasi anggaran Provinsi Yogyakarta pada tahun 2012 - 2022?